

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran global, ”*Deklarasi Millennium*” yang ditandatangani di New York tahun 2000 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai *Millennium Development Goals*(MDGs) (Bappenas,2007).

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan capaian pertumbuhan *Gross National Product*(GNP) baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes sendiri (*trickle down effect*) terhadap lapangan pekerjaan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat demi terciptanya

distribusi pendapatan. Fakta yang terjadi adalah beberapa negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup masyarakatnya (Todaro, 2000: 18).

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 2003). Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Membangun kesejahteraan rakyat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat dengan memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja (Propenas, 2005).

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah (Priambodo, 2014).

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Dalam masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat.

Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan adalah dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pembangunan, sehingga masih ada yang tertinggal dan tidak terangkat dari kemiskinan.

Ketenagakerjaan masih menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah, hal ini dapat tercermin pada :

1. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, sesuai triple track strategy (*pro poor, pro growth, pro job*).
2. Begitu pula pada RPJMN 2015-2019, sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan yaitu :
 - a. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4-5 persen.
 - b. Menyelesaikan masalah ketenagakerjaan seperti,
 - 1) Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh Pekerjaan yang layak,
 - 2) Kualitas angkatan kerja yang rendah,

- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda yang tinggi, &
- 4) TPT terdidik (di atas SMA) masih tinggi.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan negara Indonesia berdasarkan jenjang kelulusandapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pengangguran Terbuka Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan Tahun 2010-2014

Pendidikan tertinggi ditamatkan	2010		2011		2012		2013		2014	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Belum sekolah	59.066	157.586	93.956	205.388	126.972	85.374	112.435	81.432	134.040	74.898
Tidak tamat SD	547.164	600.221	559.661	737.610	601.753	512.041	523.400	489.152	610.574	389.550
SD	1.522.465	1.402.858	1.291.733	1.241.882	1.418.683	1.452.047	1.421.873	1.347.555	1.374.822	1.229.622
SMP	1.657.452	1.661.449	1.834.632	2.138.864	1.736.670	1.714.776	1.821.429	1.689.643	1.693.209	1.566.8388
SMA	2.111.256	2.149.123	2.385.938	2.376.254	2.043.697	1.867.755	1.874.799	1.925.660	1.893.505	1.962.7866
SMK	1.336.881	1.195.192	1.109.511	1.161.362	1.018.465	1.067.009	864.649	1.258.201	847.368	1.332.5211
Diploma	538.186	443.222	469.009	276.816	258.385	200.028	197.270	185.103	195.258	193.5177
Universitas	820.020	710.128	635.442	543.216	553.206	445.836	425.042	434.185	398.298	495.143
Total	8.592.490	8.319.779	8.379.882	8.681.392	7.757.831	7.344.866	7.240.897	7.410.931	7.147.069	7.244.905

Sumber :Badan Pusat Statistik Indonesiatahun 2010-2014

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa secara total persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sampai denganperiode Agustus 2014sebesar 7.244.905 orang (menurun 2,2%). Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019 yang ingin dicapai maka dapat dikatakan bahwa TPT Indonesia masih jauh dari angka yang diharapkan dimana TPT terdidik (di atas SMA) masih tinggi.

Dalam Tabel 1.2 menjelaskan bahwa di Indonesia persentase pencari kerja tertinggi terdapat di provinsi Jawa Barat dengan jumlah 764.059 orang, provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 504.028 orang, provinsi Jawa Timur dengan jumlah 329.209 orang, dan provinsi Banten dengan jumlah

279.526orang. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 504.028 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2010

Provinsi	Angkatan kerja		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Aceh	1.776.254	162.262	1.938.516
Sumatera Utara	6.125.571	491.809	6.617.377
Sumatera Barat	2.041.454	152.586	2.194.040
Riau	2.170.247	207.247	2.377.494
Kepulauan Riau	769.486	57.049	826.535
Jambi	1.462.405	83.278	1.545.683
Sumatera Selatan	3.421.193	243.851	3.665.044
Kepulauan Bangka Belitung	585.136	34.927	620.063
Bengkulu	815.741	39.285	855.026
Lampung	3.737.078	220.619	3.957.697
DKI Jakarta	4.689.761	582.843	5.272.604
Jawa Barat	16.942.444	1.951.391	18.893.835
Banten	4.583.085	726.377	5.309.462
Jawa Tengah	15.809.447	1.046.883	16.856.330
DI Yogyakarta	1.775.148	107.148	1.882.296
Jawa Timur	18.698.108	828.943	19.527.051
Bali	2.177.358	68.791	2.246.149
NTB	2.132.933	119.143	2.252.076
NTT	2.061.229	71.152	2.132.381
Kalimantan Barat	2.095.705	101.62	2.197.325
Kalimantan Tengah	1.022.580	44.153	1.066.733
Kalimantan Selatan	1.743.622	96.674	1.840.296
Kalimantan Timur	1.481.898	166.557	1.648.455
Sulawesi Utara	936.939	99.635	1.036.574
Gorontalo	432.926	23.573	456.499
Sulawesi Tengah	1.164.226	56.228	1.220.454
Sulawesi Selatan	3.272.365	298.952	3.571.317
Sulawesi Barat	514.867	17.304	532.171
Sulawesi Tenggara	997.678	48.221	1.045.899
Maluku	586.43	64.909	651.339
Maluku Utara	411.361	26.397	437.758
Papua	1.456.545	53.631	1.510.176
Papua Barat	316.547	26.341	342.888
Jumlah	108.207.767	8.319.779	116.526.546

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumbangan potensi cukup besar bagi perekonomian nasional. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Namun, sektor andalan provinsi Jawa Tengah belum terlaksana secara optimal.

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan PDRB. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Namun disisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Salah satu masalah yang perlu disikapi secara tegas dan bijak adalah masalah ketenagakerjaan.

Tabel 1.3
Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja					
	Bekerja		Pengangguran		Total Angkatan Kerja	
	Jiwa	Pertum (%)	Jiwa	Pertum (%)	Jiwa	Pertum (%)
2009	15.835.382	-	1.252.267	-	17.087.648	-
2010	15.809.447	-0,16	1.046.883	-16,40	16.856.330	-1,35
2011	15.822.765	0,08	1.203.342	14,94	17.026.107	1,01
2012	16.531.395	4,47	982.093	-18,38	17.513.488	2,86
2013	16.469.960	-0,37	1.054.062	7,32	17.524.022	0,06
2014	16.550.682	0,49	996.344	-5,47	17.547.026	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi perubahan jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat yakni sebanyak 16.856.330 orang pada tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 17.026.107 orang pada tahun 2011. Pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 17.513.488 orang, masih kembali meningkat menjadi 17.524.022 orang pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 17.547.026 orang.

Jumlah angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan Jawa Tengah yang berarti bahwa angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan proses ekonomi. Ini menggambarkan bahwa dinamika proses pembangunan harus mampu melibatkan seluruh angkatan kerja maka pengangguran terbuka yang besar itu dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Jumlahnya pengangguran terbuka yang berfluktuasi menunjukkan bahwa angkatan kerja belum mampu diberdayakan secara optimal oleh berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan karena dampaknya yang besar baik ke perekonomian maupun sosial. Dampak adanya pengangguran adalah *output loss* yang hilang karena tidak bekerjanya para penganggur dan semakin tingginya beban mereka yang bekerja untuk menanggung hidup para penganggur ini.

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Jawa Tengah seharusnya juga diikuti oleh kemampuan masing-masing sektor untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja di Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 1.3 tercatat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kapasitas produksi dan proses ekonomi di Jawa Tengah.

Penurunan jumlah produk barang dan jasa ini berarti juga bahwa terjadi penurunan jumlah faktor produksi yang digunakan dan salah satunya adalah tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan sifat permintaan tenaga kerja yang *derived demand* yang berarti bahwa permintaan terhadap tenaga kerja merupakan gambaran permintaan terhadap barang dan jasa. Namun dari data di atas dapat dilihat bahwa penurunan jumlah produk barang dan jasa yang ada di Jawa Tengah belum diikuti oleh permintaan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2010 perekonomian tumbuh sebesar 5,84% ternyata pengangguran terbuka mengalami penurunan cukup besar yaitu 16,4%.

Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,01% dengan pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 14,94%. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 6,29% dengan penurunan pengangguran terbuka sebesar 18,38%. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,81% dengan peningkatan pengangguran terbuka sebesar 7,32%. Kemudian pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi menurun

menjadi 5,43% dengan peningkatan terbuka mengalami peningkatan sebesar 5,47%(Tabel 1.3 dan Tabel 1.4).

Tabel 1.4
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	579.553.545,83	5,84
2011	613.372.403,20	6,01
2012	691.090.764,33	6,29
2013	731.241.041,54	5,81
2014	770.932.186,65	5,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Upah minimum regional Jawa Tengah dan produktivitas tenaga kerja setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tingkat upah sebesar Rp 660.000,00 dan produktivitas tenaga kerja sebesar 8.959,7. Tahun 2011 upah dan produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar Rp 675.000,00 dan 9.711,1. Tahun 2012 terjadi peningkatan lagi pada upah dan produktivitas tenaga kerja menjadi sebesar Rp 765.000,00 dan 11.925,2.

Tahun 2013 terjadi peningkatan lagi pada upah dan produktivitas tenaga kerja menjadi sebesar Rp 830.000,00 dan 16.027,6. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi pada upah dan produktivitas tenaga kerja menjadi sebesar Rp 910.000,00 dan 21.715,7. Maka, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peningkatan upah di Jawa Tengah akan selalu meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 1.5
Upah Minimum Regional Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	Tingkat Upah (Rp)	Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/org)
2010	660.000	8.959,7
2011	675.000	9.711,1
2012	765.000	11.925,2
2013	830.000	16.027,6
2014	910.000	21.715,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Diolah Tahun 2010-2014

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010-2014 bahwa produktivitas tenaga kerja meningkat sementara jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2010-2014 juga mengalami peningkatan dimana seharusnya peningkatan produktivitas tenaga kerja harus mengurangi penyerapan tenaga kerja. (Tabel 1.3 dan Tabel 1.5).

Peningkatan upah pada setiap tahunnya juga belum mampu menyerap tenaga kerja. Dimana pada tahun 2011 upah meningkat tetapi justru menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebesar 14,94% dan tingkat upah sebesar Rp 675.000,00. Kemudian di tahun 2013 upah mengalami peningkatan tetapi justru pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 7,32% dan tingkat upah sebesar Rp 830.000,00 (Tabel 1.3 dan Tabel 1.5).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produktifitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh produktifitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Pemerintah atau Instansi Tertentu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai strategi kebijakan yang optimal untuk mengurangi tingginya pengangguran di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan bisa menjadi informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis ataupun lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di bidang ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Variabel-variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan variabel independen. Dengan variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja dan variabel independen yaitu produktivitas tenaga kerja, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi.

2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004) data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang

diukur dalam suatu skala *numeric* (angka). Data kuantitatif disini berupa data time series yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait. Data-data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)Indonesia ataupun Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2010-2014.

3. Metode Analisis Regresi Data Panel

Analisis data panel adalah metode yang digunakan untuk menguraikan pengaruh variabel-variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan model statistik dengan pengolahan data data panel melalui program *Eviews*. Dalam penelitian ini, pengukuran pengaruh *produktivitas tenaga kerja*, *upah minimum*, dan *pertumbuhan ekonomi* terhadap penyerapan tenaga kerja yang diukur dengan metode PLS (*Pooled Least Square*) dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$EMP = \beta_0 + \beta_1 D1_t + \beta_2 D2_t + \beta_3 D3_t + \beta_4 WP_t + \beta_5 PE_t + \beta_6 PROD_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

EMP : Employment

β_0 : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien pengaruh variabel dummy WP, PE, PROD

$\beta_4 - \beta_6$: Koefisien pengaruh variabel WP, PE, PROD

WP : Upah Minimum

PE : Pertumbuhan Ekonomi
 PROD : Produktivitas Tenaga Kerja
 ε_t : Error Term

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain :

a. Penentuan Model Estimasi

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan tiga model estimasi yaitu :

1) *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square* (PLS) merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel maka model persamaan regresinya adalah. (Winarno 2009)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

2) *Fixed Effect Model* (FEM) Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan peubah *dummy* sehingga model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Model *Fixed Effect* dengan teknik variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut (Winarno 2009):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 d_{1it} + \beta_6 d_{2it} + \beta_7 d_{3it} + \dots + \beta_n d_{nit} + e_{it}$$

3) *Random Effect Model* (REM) Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model

ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM)

atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Penulis akan konstanta dalam model *Random Effect* tidak lagi tetap tetapi bersifat random

sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut (Winarno 2009):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} + \mu_i$$

b. Penentuan Metode Estimasi

Setelah melakukan pendekatan dengan menggunakan ketiga metode tersebut, selanjutnya akan ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel. Secara formal terdapat tiga pengujian yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut :

1) Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam

mengestimasi data panel. Apabila Hasil: (1) H_0 : Pilih PLS, dan (2) H_1 : Pilih FEM.

2) Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Apabila Hasil: (1) H_0 : Pilih REM, dan (2) H_1 : Pilih FEM.

3) Uji Langrange Multiplier

Uji *Langrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan. Apabila Hasil: (1) H_0 : Pilih PLS, dan (2) H_1 : Pilih REM.

c. Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan, perlu digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen*, baik secara parsial maupun secara simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Pengujian hipotesa tersebut adalah dengan cara:

1) Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan

baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2012).

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.

3) Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan Uji F.

F. Sistem Penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Merupakan uraian tentang variabel penelitian dari definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan masalah penelitian.

BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait dalam masalah penyerapan tenaga kerja.